

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Penyajian informasi keuangan dianggap tepat waktu jika mampu disediakan pada saat dibutuhkan (saat yang tepat). Informasi tersebut dapat disediakan sebelum kehilangan kapasitasnya, yaitu mampu mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Ketepatan waktu mengacu pada jumlah waktu yang diperlukan untuk membuat informasi keuangan diketahui orang lain [1]. Informasi akan dianggap berkualitas (berguna) jika informasi tersebut mudah dipahami oleh pemakai atau para pengambil keputusan. Hal ini sejalan dengan tujuan laporan keuangan, yaitu diantaranya adalah menyediakan informasi yang berguna bagi para pemakai yang memiliki pemahaman yang memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi untuk membuat keputusan investasi serta kredit. Jadi agar informasi dapat dikatakan bermanfaat maka informasi tersebut haruslah dapat dipahami (*understandability*) [16].

Agar tujuan penyusunan laporan dapat tercapai, yaitu dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan, beberapa lembaga, diantaranya adalah IASB, telah menyusun kriteria yang dikenal dengan karakteristik kualitatif informasi keuangan. Hal ini berarti bahwa penyusunan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan, dapat menjadikan laporan keuangan tersebut berguna untuk pengambilan keputusan. Dengan kata lain, laporan keuangan akan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan jika memenuhi karakteristik informasi keuangan. Karakteristik informasi keuangan yang dirumuskan oleh IASB meliputi relevansi (*relevance*), penyajian jujur (*faithfull representation*), dapat dibandingkan (*comparability*), dapat diverifikasi (*verifiability*), dan dapat dipahami (*understandability*) [1]. Informasi keuangan dikatakan relevan jika dapat mempengaruhi pengambilan keputusan *user* atau dengan kata lain mampu membuat beda hasil dari berbagai alternative keputusan yang ada [16].

Informasi yang tepat waktu, yang cukup akurat dan lengkap, lebih berharga daripada informasi sempurna yang terlambat disampaikan hingga menjadi tidak

berguna. Oleh karenanya, sistem harus menyediakan pengguna informasi yang cukup tepat waktu untuk mendukung tindakan yang dibutuhkan [17]. Penyampaian laporan keuangan dikatakan tepat waktu apabila mampu disediakan secara cepat dan tidak melebihi batas waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa emiten atau perusahaan publik menyampaikan laporan keuangan tahunan paling lambat pada akhir bulan ke empat setelah tahun buku berakhir. Sedangkan untuk laporan keuangan tengah tahunan, yaitu [18]:

1. Selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal pelaporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan.
2. Selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal pelaporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas.
3. Selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal pelaporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Dengan demikian ketepatan waktu berarti memiliki informasi yang tersedia untuk pembuat keputusan pada waktunya untuk dapat mempengaruhi keputusan mereka. Jika informasinya lebih lama maka tidak akan berguna lagi. Suatu informasi mungkin menjadi kurang berguna jika ada keterlambatan dalam melaporkannya. Ada keseimbangan antara ketepatan waktu dan penyediaan informasi yang dapat diandalkan. Jika informasi dilaporkan tepat waktu ketika tidak semua aspek transaksi diketahui, mungkin tidak lengkap atau bebas dari kesalahan. Sebaliknya jika setiap detail transaksi diketahui, mungkin sudah terlambat untuk mempublikasikan informasi karena telah menjadi tidak relevan. Pertimbangan utama adalah cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi pengguna.

Ketepatan waktu diukur berdasarkan *dummy variabel* dimana untuk laporan keuangan yang menyatakan tepat waktu diberi nilai 1 dan laporan keuangan yang tidak tepat waktu diberi nilai 0.

2.1.2. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan

keuntungan, dengan cara menjual produk (barang dan/atau jasa) kepada para pelanggannya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit, baik profit jangka pendek maupun profit jangka panjang. Manajemen dituntut untuk meningkatkan imbal hasil (return) bagi pemilik perusahaan, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini semua hanya dapat terjadi apabila perusahaan memperoleh laba dalam aktivitas bisnisnya [19].

Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Disamping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan [19]. Dengan kata lain, rasio profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan didalam menghasilkan keuntungan atau tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau profit. Profitabilitas sering digunakan sebagai pengukur kinerja manajemen perusahaan dan efisiensi penggunaan modal.

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari perubahan tersebut [20].

Profitabilitas diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan

untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset [19]. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas aset: [21].

$$ROA = \frac{\text{lab a bersih}}{\text{total aset}} \quad (2.1)$$

Berdasarkan teori diatas, dapat di simpulkan bahwa rasio profitabilitas dapat memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset, maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas juga dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang mempengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Perusahaan harus memperoleh keuntungan dan kinerja yang baik guna menghasilkan profitabilitas yang baik. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.

2.1.3. Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Dengan kata lain, rasio likuiditas adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Jika perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, maka perusahaan tersebut dikatakan sebagai perusahaan yang likuid. Sebaliknya, jika perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, maka perusahaan tersebut dikatakan sebagai perusahaan yang tidak likuid. Untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo, perusahaan harus memiliki tingkat ketersediaan jumlah kas yang baik

atau aset lancar lainnya yang juga dapat dengan segera dikonversi atau diubah menjadi kas [19].

Rasio likuiditas diproksikan dengan *Current Ratio* (CR). Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset yang tersedia. Dengan kata lain, rasio lancar ini menggambarkan seberapa besar jumlah ketersediaan aset lancar yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total kewajiban lancar. Oleh sebab itu, rasio lancar dihitung sebagai hasil bagi antara total aset lancar dengan total kewajiban lancar. Aset lancar adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan akan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan, tergantung mana yang paling lama. Kas (*cash on hand dan cash in bank*) merupakan aset yang paling likuid (lancar), lalu diikuti dengan investasi jangka pendek (surat-surat berharga), piutang usaha, piutang wesel, piutang lain-lain, persediaan, perlengkapan, biaya dibayar dimuka, dan aset lancar lainnya. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang diperkirakan akan dibayar dengan menggunakan aset lancar atau menciptakan kewajiban lancar lainnya dan harus segera dilunasi dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan, tergantung mana yang paling lama [19].

Perusahaan harus secara terus menerus memantau hubungan antara besarnya kewajiban lancar dengan aset lancar. Hubungan ini sangat penting terutama untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Perusahaan yang memiliki lebih banyak kewajiban lancar dibanding aset lancar, biasanya perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan likuiditas ketika kewajiban lancarnya jatuh tempo. Berdasarkan hasil perhitungan rasio, perusahaan yang memiliki rasio lancar yang kecil mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki modal kerja (aset lancar) yang sedikit untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, apabila perusahaan memiliki rasio lancar yang tinggi, belum tentu perusahaan tersebut dikatakan baik. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, rasio lancar yang tinggi dapat saja terjadi karena kurang efektifnya manajemen kas dan persediaan. Oleh sebab itu, untuk dapat mengatakan apakah suatu perusahaan memiliki tingkat

likuiditas yang baik atau tidak maka diperlukan suatu standar rasio, seperti standar rasio rata-rata industri dari segmen usaha yang sejenis. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung rasio lancar [19]:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{aset lancar}}{\text{kewajiban lancar}} \quad (2.2)$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas merupakan dimana perusahaan mampu memenuhi atau melunasi kewajiban jangka pendeknya, dengan asumsi bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan baik. Perusahaan yang sudah mampu melunasi hutang jangka pendeknya dianggap sudah baik dalam melakukan kinerja manajemen, sehingga hal ini merupakan kabar baik bagi perusahaan dan segera ingin menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi stabil. Hal ini akan mempengaruhi minat investor dan akan meningkatkan nilai pasar. Perusahaan dengan kondisi baik cenderung akan terdorong lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan.

2.1.4. Leverage

Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva [20]. Ratio *leverage* yang mengukur seberapa banyak dana yang disupply oleh pemilik perusahaan dalam proporsinya dengan dana yang diperoleh dari kreditur perusahaan, mempunyai beberapa implikasi [22].

Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi (memiliki utang yang besar) dapat berdampak pada timbulnya risiko keuangan yang besar, tetapi juga memiliki peluang yang besar pula untuk menghasilkan laba yang tinggi. Risiko keuangan yang besar ini timbul karena perusahaan harus menanggung atau terbebani dengan pembayaran bunga dalam jumlah yang besar. Namun, apabila dana hasil pinjaman tersebut dipergunakan secara efisien dan efektif dengan membeli aset produktif tertentu (seperti mesin dan peralatan) atau untuk membiayai ekspansi bisnis perusahaan, maka hal ini akan memberikan peluang yang besar bagi perusahaan untuk meningkatkan hasil usahanya. Sebaliknya, perusahaan dengan rasio *leverage*

yang rendah memiliki rasio keuangan yang kecil, tetapi juga mungkin memiliki peluang yang kecil pula untuk menghasilkan laba yang besar [21]. Oleh karena itu, manajer keuangan dituntut untuk mengelola rasio leverage dengan baik sehingga mampu menyeimbangkan pengembalian yang tinggi dengan tingkat resiko yang dihadapi. Besar kecilnya rasio *leverage* sangat tergantung dari pinjaman yang dimiliki perusahaan, disamping aktiva yang dimilikinya (ekuitas). Pengukuran rasio *leverage*, dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu [20]:

1. Mengukur rasio-rasio neraca dan sejauh mana pinjaman digunakan untuk permodalan.
2. Melalui pendekatan rasio-rasio laba rugi.

Dengan analisis rasio *leverage*, perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah diketahui, manajer keuangan dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna menyeimbangkan penggunaan modal. Akhirnya, dari rasio ini kinerja manajemen selama ini akan terlihat apakah sesuai tujuan perusahaan atau tidak. Rasio *leverage* diproksikan dengan *debt to equity ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai bagi hasil antara total hutang dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang. Rasio ini memberikan petunjuk umum tentang kelayakan kredit dan risiko keuangan debitor [19].

Memberikan pinjaman kepada debitor yang memiliki tingkat *debt to equity ratio* yang tinggi menimbulkan konsekuensi bagi kreditor untuk menanggung risiko yang lebih besar pada saat debitor mengalami kegagalan keuangan. Hal ini tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi debitor. Sebaliknya, apabila kreditor memberikan pinjaman kepada debitor yang memiliki tingkat *debt to equity ratio* yang rendah (yang berarti tingginya tingkat pendanaan debitor yang berasal dari modal pemilik) maka hal ini dapat mengurangi risiko kreditor (dengan adanya batas pengaman yang besar) pada saat debitor mengalami kegagalan keuangan. Dengan kata lain, akan

lebih aman bagi kreditor apabila memberikan pinjaman kepada debitor yang memiliki tingkat debt to equity ratio yang rendah karena hal ini berarti bahwa akan semakin besar jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Semakin tinggi *debt to equity ratio* maka berarti semakin kecil jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Ketentuan umumnya adalah bahwa debitor seharusnya memiliki *debt to equity ratio* kurang dari 0,5 namun perlu diingat juga bahwa ketentuan ini tentu saja dapat bervariasi tergantung pada masing-masing jenis industry. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung rasio hutang (*debt to equity ratio*) terhadap modal [19]:

$$\text{Debt to equity ratio (DER)} = \frac{\text{total hutang}}{\text{total modal}} \quad (2.3)$$

Dapat disimpulkan bahwa rasio *leverage* menggambarkan bagaimana perusahaan dalam melunasi hutang jangka panjangnya. Jika perusahaan memiliki hutang yang tinggi dari investor berarti modal perusahaan bergantung pada pembiayaan dari luar, namun perusahaan dengan hutang yang rendah cenderung membiayai operasional perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio *leverage* mengindikasikan maka semakin tinggi pula proporsi hutang yang dimiliki suatu perusahaan. Kepemilikan hutang yang tinggi diasumsikan bahwa perusahaan tersebut masih mendapatkan kepercayaan dari pihak kreditor. Selain itu, perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi juga mempunyai aset yang banyak sehingga dianggap perusahaan tersebut mampu menjalankan usahanya, sehingga mendorong perusahaan untuk tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan.

2.1.5. Kompleksitas Operasi Perusahaan

Volume aktivitas ekonomi dalam dunia bisnis dan entitas lainnya, bersamaan dengan kompleksitas pertukaran ekonomi tersebut, seringkali mempersulit pencatatan transaksi dan alokasi biaya serta pendapatan dengan benar. Keputusan yang sulit berkaitan dengan perlakuan akuntansi dan pengungkapannya membutuhkan jasa akuntansi profesional [23].

Semakin besar skala suatu usaha maka semakin banyak jenis dan kompleksitas proses bisnis yang terdapat didalamnya. Sebagai konsekuensinya

dibutuhkan daya komputasi yang semakin besar dan sistem yang juga semakin besar untuk menangani semua proses bisnis tersebut. Dalam akuntansi, kompleksitas aktivitas bisnis suatu perusahaan diklasifikasikan dalam tiga golongan jenis usaha generik yang berbeda yaitu jasa, dagang, dan manufaktur. Kompleksitas operasi perusahaan berkaitan dengan penggabungan usaha yang dilakukan oleh dua perusahaan. Perusahaan merupakan wadah untuk menggapai tujuan bersama para pendirinya dengan melakukan beberapa kegiatan seperti melakukan kegiatan ekonomi dan sosial dalam suatu masyarakat. Perusahaan yang menjalankan kegiatan tersebut tidak disebut sebagai perusahaan karena unsur mencari laba merupakan karakteristik khusus yang membedakan antara organisasi perusahaan dengan organisasi lainnya [24].

Pertumbuhan aktivitas sektor publik mengakibatkan level dan kompleksitas aktivitas ekonomi pun meningkat. Pertumbuhan volume dan kompleksitas tersebut mengakibatkan klasifikasi anggaran, pengukuran, dan pelaporan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, dan beban menjadi lebih sulit. Hal tersebut mengakibatkan kesulitan dalam merancang sistem akuntansi untuk pelaporan transaksi ekonomi secara tepat. Kompleksitas perusahaan dapat dilihat dari jumlah dan jenis transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas ketidakmampuan menyediakan laporan keuangan yang tepat waktu. Kompleksitas operasi perusahaan dalam penelitian ini ditentukan dengan ada tidaknya anak perusahaan [25].

Kompleksitas operasi perusahaan diukur menggunakan *variabel dummy*, dimana diberi angka 1 untuk perusahaan yang memiliki anak perusahaan dan diberi angka 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan.

2.1.6. Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik adalah kepemilikan yang dimiliki oleh publik (masyarakat). Dalam meningkatkan nilai perusahaannya diperlukan pendanaan yang baik melalui pendanaan internal maupun eksternal. Sumber pendanaan eksternal juga didapat dari masyarakat (publik). Kepemilikan publik merupakan persentase saham

yang dimiliki oleh publik. Persentase kepemilikan publik yang ada disebut perusahaan merupakan dapat memonitoring perusahaan dengan adanya kepemilikan publik yang besar. Maka semakin banyak pula pengawasan yang dilakukan dan perusahaan juga harus dapat mengungkapkan seluruh informasi yang diperlukan oleh pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan publik yang besar diharapkan perusahaan lebih transparan dalam pengungkapan informasi mengenai perusahaan yang akan berdampak terhadap nilai perusahaan dan dengan adanya pengawasan oleh pihak kepemilikan publik terhadap manajemen dapat membuat pihak manajemen jadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan [11].

Kadang kala kepemilikan publik terjadi ketika investor swasta tidak mau melakukan investasi pada apa yang mereka anggap sebagai proyek berisiko tinggi. Besarnya investasi sering kali ditentukan dari jumlah aktiva pada unit bisnis yang juga didasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum. Alternatifnya, investasi dapat diukur dari nilai kepemilikan, yang dapat ditentukan dari ekuitas pemegang saham pada laporan keuangan perusahaan publik. Manajer atau sekelompok pemegang saham utama seringkali membeli seluruh saham perusahaan. Perusahaan tersebut kemudian menjadi perusahaan yang dimiliki secara pribadi, dan sahamnya tidak lagi diperdagangkan secara publik. Beberapa perusahaan mengizinkan pekerja untuk membeli sejumlah besar saham, sehingga karyawan memperoleh rasa memiliki [26].

Kemajuan teknologi transportasi dan industri telah menimbulkan skala ekonomi dan perusahaan yang lebih besar, munculnya manajer profesional serta pertumbuhan kepemilikan perusahaan oleh banyak orang. Permintaan audit meningkat demikian besar sebagai akibat pertumbuhan kepemilikan publik yang sangat cepat atas sekuritas perusahaan. Bersamaan dengan itu, adanya kebutuhan akan pelaporan keuangan yang seragam menjadi semakin jelas [27]. Dengan kata lain, kepemilikan publik pihak luar kecil kemungkinan terlibat dalam urusan bisnis perusahaan sehari-hari.

Dengan demikian kepemilikan publik perusahaan mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Pihak manajemen dituntut untuk melakukan kinerja dengan baik dalam menyajikan informasi secara tepat waktu karena ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan akan berpengaruh

pada pengambilan keputusan. Berikut rumus untuk mencari persentase kepemilikan publik [11]:

$$\text{Kepemilikan publik} = \frac{\text{Jumlah saham kepemilikan publik}}{\text{Total saham yang beredar}} \quad (2.4)$$

2.1.7. Reputasi KAP

Kantor Akuntan Publik (KAP) mempunyai peran dalam proses pengungkapan. KAP memberikan jaminan secara independen kepada investor bahwa laporan keuangan yang disajikan perusahaan telah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dengan jaminan itu, kredibilitas laporan keuangan menjadi bertambah. Bukti perhatian investor terhadap kredibilitas ini laporan keuangan auditan ini adalah adanya reaksi harga saham yang disebabkan oleh adanya pengumuman laba. Kualitas dan reputasi kantor akuntan publik (KAP) berbeda antara yang satu dengan yang lain, hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan publik harus memilih kantor akuntan publik (KAP) yang dipandang berkualitas atau bereputasi tinggi untuk melakukan pengauditan terhadap laporan keuangan mereka, baik pada waktu *initial public offerings* (IPO) maupun setelah perusahaan terdaftar di bursa. Banyak perusahaan yang *go public* mengganti KAP-nya, mereka mengganti kantor akuntan publik (KAP) lokal dengan kantor akuntan publik (KAP) nasional yang besar dengan alasan bahwa kantor akuntan publik (KAP) lokal mempunyai kekurangan pemahaman tentang ketentuan-ketentuan pasar modal. KAP besar umumnya mempunyai pemahaman tentang ketentuan pasar modal yang baik sehingga dapat mendorong kliennya untuk lebih mematuhi aturan dan ketentuan yang diwajibkan. Semakin tinggi kualitas KAP akan membuat perusahaan yang diauditnya lebih mematuhi semua ketentuan yang diatur didalam standar akuntansi keuangan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pasar modal. Kualitas KAP tidak hanya dapat mempengaruhi kepatuhan kliennya tetapi juga dapat mempengaruhi harga saham atau volume perdagangan saham klien tersebut. KAP besar dan bereputasi pada umumnya mempunyai kualitas tinggi [28].

Menunjuk kantor akuntan publik (KAP) yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit dari sisi finansial perusahaan calon emiten. Pernyataan KAP terkait

dengan kelayakan calon emiten untuk *go public* dipengaruhi dari sisi laporan keuangan dan hasil audit lainnya. Reputasi KAP juga sangat penting karena jika suatu saat terjadi permasalahan hukum atau terdapat tuntutan dari pihak lain kepada emiten terkait dengan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP maka dapat saja KAP tersebut menjadi menurun reputasinya [29].

Reputasi KAP yang digunakan dengan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangannya. Untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangannya, perusahaan menggunakan jasa kantor akuntan publik (KAP) yang mempunyai reputasi dan nama baik. KAP berafiliasi dengan kantor akuntan publik besar yang berlaku universal yang dikenal dengan *Big Four Worldwide Accounting Firm (Big 4)* [5]. Kantor akuntan *big four* merupakan kantor akuntan internasional terbesar didunia, yaitu [30]:

1. KAP Price Waterhouse Coopers (PWC)
2. KAP Klyveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)
3. KAP Ernest & Young (E&Y)
4. KAP Deloitte Touche Thomatsu (Deloitte)

Perusahaan yang memakai KAP yang memiliki kualitas yang baik maka akan memberikan jaminan kualitas audit sedangkan perusahaan yang memilih KAP yang buruk akan memberikan kualitas yang buruk. Reputasi KAP juga ditentukan berdasarkan penilaian masyarakat dalam pencapaiannya melakukan proses audit sesuai jadwal berdasarkan reputasinya.

Reputasi KAP diukur dengan menggunakan *variabel dummy*, dimana perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan KAP Big 4 diberi angka 1 dan perusahaan yang menggunakan jasa selain KAP yang berafiliasi dengan KAP Big 4 diberi nilai 0.

2.1.8. Pergantian Auditor

Auditing merupakan salah satu bentuk atestasi yang umumnya merupakan suatu komunikasi dari seorang *expert* mengenai kesimpulan tentang reabilitas dari pernyataan seseorang. Dalam pengertian yang lebih sempit, atestasi merupakan komunikasi tertulis yang menjelaskan suatu kesimpulan mengenai reabilitas dari

asersi tertulis yang merupakan tanggungjawab dari pihak lainnya. Auditing dapat diartikan dengan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, beserta catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya [31].

Pergantian auditor, khususnya belum habis masa periode memberikan indikasi adanya ketidaksepahaman antara auditor dengan manajemen tentang akuntansi atau pengauditan. Pergantian auditor yang dipicu adanya ketidaksepahaman dengan pihak manajemen akan mengundang reaksi negative pasar terhadap nilai perusahaan. Dan memburuknya kinerja pasar perusahaan akan menjadi alasan pemilik (dewan komisaris) untuk mempertimbangkan pergantian CEO perusahaan. Kondisi yang tidak harmonis ini merupakan suatu rangkaian logis yang sering dihadapi organisasi. Akibatnya perusahaan yang mengalami pergantian auditor ini cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan, karena auditor yang baru masih harus mempelajari laporan keuangan tersebut [32].

Pergantian akuntan publik dilakukan karena telah berakhirnya kontrak kerja yang disepakati antara kantor akuntan publik dengan pemberi tugas dan telah memutuskan untuk memperpanjang dengan penugasan baru. Perusahaan yang mengalami pergantian auditor pada periode tersebut akan mengalami proses penyesuaian terhadap auditor baru, yang mana hal ini akan memakan waktu jika dibandingkan dengan pada waktu perusahaan belum berganti auditor [13]. Dengan kata lain, komunikasi antara auditor lama dengan auditor baru memberikan panduan bagi auditor tentang prosedur komunikasi antara auditor baru dengan auditor lama. Maksud dari auditor lama yaitu auditor yang sudah mengundurkan diri atau tugasnya telah berakhir dan tidak diperpanjang, sedangkan auditor baru yaitu auditor yang sudah menerima perikatan atau pengganti dari auditor lama.

Pergantian auditor diukur dengan menggunakan *variabel dummy*, dimana jika perusahaan yang tidak melakukan pergantian auditor diberi angka 1, dan jika perusahaan melakukan pergantian auditor diberi angka 0.

2.1.9. Opini Audit

Opini audit laporan keuangan merupakan salah satu pertimbangan yang penting bagi investor dalam menentukan keputusan berinvestasi karena opini yang

diberikan merupakan pernyataan kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor harus berhati-hati dalam mengeluarkan opini audit suatu perusahaan dengan melihat hal-hal yang tidak tampak dibalik laporan keuangan seperti masalah kontinuitas entitas sebab seluruh aktivitas transaksi yang telah dan akan terjadi secara implisit terkandung di dalam laporan keuangan [33].

Ada 5 jenis opini auditor, yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak adanya pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berita umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi. Dalam SA 411 paragraf empat bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia didasarkan atas pertimbangan apakah [33]:

- a. Prinsip akuntansi yang dipilih dan diterapkan telah berlaku umum di Indonesia.
- b. Prinsip akuntansi yang dipilih dan diterapkan telah berlaku umum di Indonesia.
- c. Akuntansi yang dipilih tepat untuk keadaan yang bersangkutan.
- d. Laporan keuangan beserta catatannya memberikan informasi yang cukup yang dapat mempengaruhi penggunaan, pemahaman, dan penafsiran.
- e. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan diklasifikasikan dan diikhtisarkan dengan semestinya, yang tidak terlalu rinci atau tidak terlalu ringkas.
- f. Laporan keuangan mencerminkan peristiwa dan transaksi yang mendasari suatu cara yang menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas dalam batas yang dapat diterima, yaitu batas-batas yang layak dan praktis untuk mencapai dalam laporan keuangan.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion with explanatory language*)

Apabila audit telah diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan akan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi dalam kondisi tertentu memerlukan sebuah penjelasan. Dalam SPAP Seksi 508 paragraf 11 menjelaskan kondisi yang memerlukan bahasa penjelasan tambahan, antara lain [33]:

- a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
- b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- c. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakni tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas, namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan **pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.**
- d. Di antara periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.
- e. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan auditor atas laporan keuangan komparatif.
- f. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) namun tidak disajikan atau tidak di-review.
- g. Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keragu-raguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut.
- h. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Menyatakan laporan keuangan auditan, menyajikan laporan secara wajar dalam hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang berdampak dengan yang dikecualikan. Sesuai dengan SA 508 paragraf 20 dijelaskan bahwa pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila [33]:

- a. Tidak ada bukti kompeten yang cukup adanya batasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.
- b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi.
- c. Auditor harus menjelaskan alasan pengecualian dalam satu paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat, auditor juga harus mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjukkan ke paragraf penjelasan didalam paragraf pendapat.

4. Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*)

Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Pendapat ini dinyatakan bila, menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Apabila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya, yaitu [31]:

- a. Semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar, dan
- b. Dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas, jika secara praktis untuk dilaksanakan. Jika dampak tersebut tidak dapat ditentukan secara beralasan, laporan audit harus menyatakan hal itu.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*), yaitu [31]:
- a. Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut.
 - b. Pernyataan tidak memberikan pendapat adalah cocok jika auditor tidak melaksanakan audit yang lingkungannya memadai untuk memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat harus tidak diberikan karena auditor yakin atas dasar auditnya bahwa terdapat penyimpangan material dari SAK/ETAP/IFRS. Jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan pembatasan lingkup audit, auditor harus menunjukkan dalam paragraf terpisah semua alasan substantive yang mendukung pernyataannya tersebut. Ia harus menyatakan bahwa lingkup auditnya tidak memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Dengan demikian, opini audit dibutuhkan untuk setiap laporan keuangan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Opini audit yang diberikan oleh akuntan publik setelah dilakukan melalui beberapa tahap audit dapat memberikan simpulan atas opini yang harus diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Opini audit diukur berdasarkan dengan *dummy variabel* dimana untuk laporan keuangan yang mendapatkan *unqualified opinion* mendapatkan *good news* diberi nilai 1 dan laporan keuangan non *unqualified opinion* mendapatkan badnews diberi nilai 0.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa review dari peneliti terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, antara lain:

1. Apriliani Issana Putri dan Bambang Suryono pada tahun 2015 melakukan penelitian dengan judul “Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan”. Objek penelitian yaitu pada perusahaan perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013 dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 64 perusahaan. Adapun hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa profitabilitas, likuiditas, *leverage*, kepemilikan publik, reputasi kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan kompleksitas operasi perusahaan dan pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [5].
2. Dedik Norman Pradipta dan Bambang Suryono pada tahun 2017 melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan”. Objek penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 207 perusahaan. Adapun hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, *debt to equity ratio*, dan kualitas auditor secara signifikan berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sedangkan opini audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [14].
3. Denny Andriana dan Nada Arina Raspati pada tahun 2015 melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas dan Kepemilikan Publik terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan”. Objek penelitian dilakukan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013 dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 363 perusahaan. Adapun hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan [12].
4. Irfan Haris Setiawan dan Dini Widyawati pada tahun 2014 melakukan penelitian dengan judul “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Indonesia”. Objek penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode 2008-2012 dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 32 perusahaan. Adapun hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan publik yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan umur perusahaan, DER, ROA, CR, dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [9].

5. Mega Arista Dewayani, Moh. Al Amin dan Veni Soraya Dewi pada tahun 2017 melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan”. Objek penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2016 dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 26 perusahaan. Adapun hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa reputasi KAP dan *leverage* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, profitabilitas, likuiditas, dan penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [6].
6. R. Ait Novatiani dan Nadia Putri Asri pada tahun 2016 melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Opini Auditor, dan Kompleksitas Operasi Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan”. Objek penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-2014 dan jumlah sampel sebanyak 141 perusahaan. Adapun hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa *leverage*, ukuran perusahaan, opini auditor, dan kompleksitas operasi perusahaan secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan [10].
7. Sarwono Budiyanto dan Elma Muncar Aditya pada tahun 2015 melakukan penelitian dengan judul “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan”. Objek penelitian dilakukan pada perusahaan food and beverages yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012 dan jumlah sampel sebanyak 46 perusahaan. Adapun hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pergantian auditor berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan *debt to equity ratio*, profitabilitas, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan [13].

8. Sigit Mareta pada tahun 2015 melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Timeliness Publikasi Laporan Keuangan”. Objek penelitian dilakukan pada seluruh emiten di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2010 dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 97 perusahaan. Adapun hasil dari peneliti tersebut menyatakan bahwa profitabilitas dan opini auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Sedangkan likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, opini auditor, reputasi akuntan publik (*Big 4*), pergantian kantor akuntan publik, dan pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [15].

Tabel 2.1. Review Peneliti Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
Apriliani Issana Putri dan Bambang Suryono (2015)	Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Pelaporan Keuangan	<u>Variabel Dependen:</u> Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan <u>Variabel Independen:</u> 1. Profitabilitas 2. Likuiditas 3. <i>Leverage</i> 4. Kompleksitas Operasi Perusahaan 5. Kepemilikan Publik 6. Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) 7. Pergantian Auditor	1. Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Publik, Reputasi KAP berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 2. Kompleksitas Operasi Perusahaan dan Pergantian Auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
Dedik Norman Pradipta dan Bambang Suryono (2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	<u>Variabel Dependen:</u> Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. <u>Variabel Independen:</u> 1. Ukuran Perusahaan 2. Profitabilitas 3. <i>Debt To Equity Ratio</i> (DER) 4. Kualitas Auditor 5. Opini Audit	1. Ukuran Perusahaan, Profitailitas, Debt To Equity Ratio, Kualitas Auditor secara signifikan berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. 2. Opini audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Denny Andriana dan Nada Arina Raspati (2015)	Pengaruh Profitabilitas dan Kepemilikan Publik Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	<u>Variabel Dependen:</u> Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. <u>Variabel Independen:</u> 1. Profitabilitas 2. Kepemilikan Publik	1. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 2. Kepemilikan Publik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Table 2.1 sambungan

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
Irfan Haris Setiawan dan Dini Widyawati (2014)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Indonesia	<u>Variabel Dependen:</u> Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan <u>Variabel Independen:</u> 1. Ukuran Perusahaan 2. Umur Perusahaan 3. Struktur Kepemilikan Publik 4. <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i> 5. <i>Return On Asset (ROA)</i> 6. <i>Current Ratio (CR)</i> 7. Reputasi Auditor	1. Ukuran Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Publik Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. 2. Umur Perusahaan, DER, ROA, CR, dan Reputasi Auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Mega Arista Dewayani, Moh. Al Amin, dan Veni Soraya Dewi (2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan	<u>Variabel Dependen:</u> Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan <u>Variabel Independen:</u> 1. Ukuran Perusahaan 2. Struktur Kepemilikan 3. Profitabilitas 4. <i>Leverage</i> 5. Likuiditas 6. Reputasi KAP 7. Penghindaran Pajak	1. Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Profitabilitas, Likuiditas, dan Penghindaran Pajak tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 2. Leverage dan Reputasi KAP berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
R.Ait Novatiani dan Nadia Putri Asri (2016)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Opini Auditor, dan Kompleksitas Operasi Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan.	<u>Variabel Dependen:</u> Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan <u>Variabel Independen:</u> 1. <i>Leverage</i> 2. Ukuran Perusahaan 3. Opini Auditor 4. Kompleksitas Operasi Perusahaan	1. <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Opini Auditor, dan Kompleksitas Operasi Perusahaan secara silmultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
Sarwono Budiyanto dan Elma Muncar Aditya (2015)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.	<u>Variabel Dependen:</u> Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. <u>Variabel Independen:</u> 1. <i>Debt To Equity Ratio (DER)</i> 2. Profitabilitas 3. Struktur Kepemilikan 4. Ukuran Perusahaan 5. Kualitas Auditor 6. Pergantian Auditor	1. <i>Debt To Equity Ratio</i> , Profitabilitas, Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Pergantian Auditor berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan.

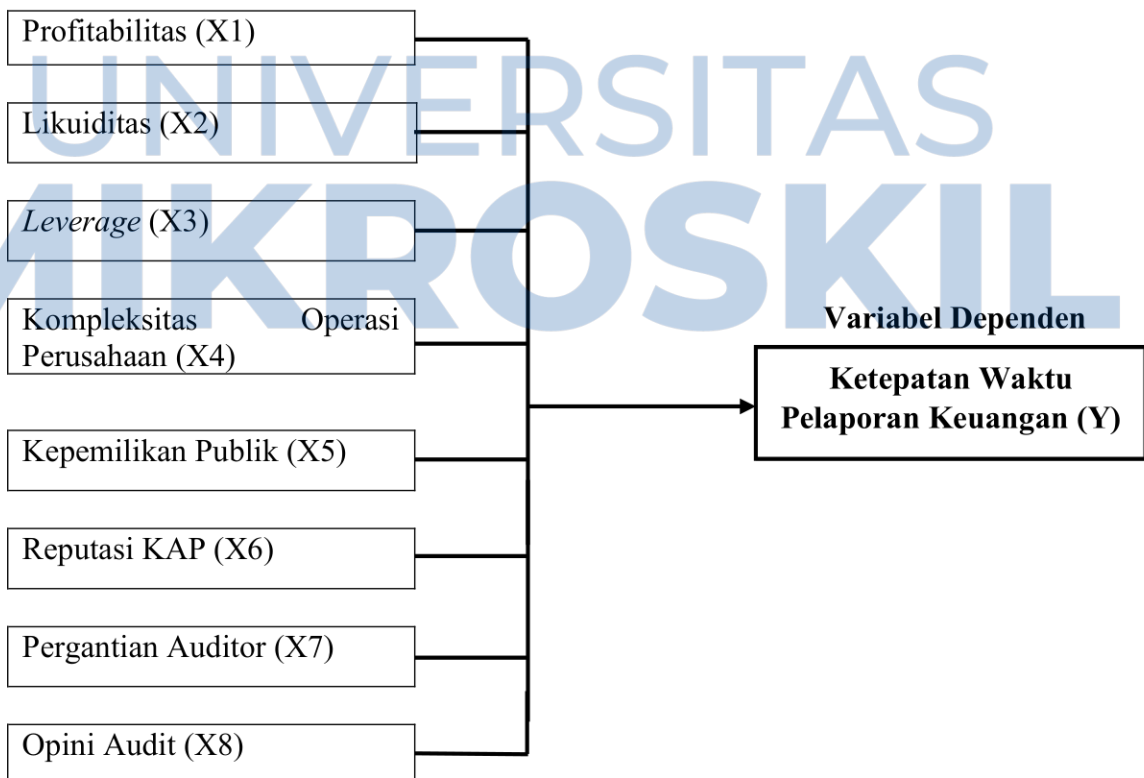
Table 2.1 sambungan

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
Sigit Mareta (2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Timeliness Publikasi Laporan Keuangan Periode 2009-2010	<p><u>Variabel Dependen:</u> Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan.</p> <p><u>Variabel Independen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas 2. Likuiditas 3. <i>Leverage</i> 4. Ukuran Perusahaan 5. Penggunaan KAP Besar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas dan Opini Audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. 2. Likuiditas, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, Penggunaan KAP besar (<i>Big 4</i>), Lamanya Perusahaan menjadi Klien KAP, dan Pergantian Manajemen

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konsep tentang bagaimana teori yang digunakan berhubungan dengan faktor yang telah peneliti teliti sebagai masalah penting. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dilampirkan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Variabel Independen



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, Variabel dependen pada penelitian ini adalah Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Variabel independen pada penelitian ini adalah Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, Kompleksitas Operasi Perusahaan, Kepemilikan Publik, Reputasi KAP, Pergantian Auditor, dan Opini Audit.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Ketepatan Waktu

Profitabilitas mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat laba yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Apabila perusahaan mampu menghasilkan laba, maka perusahaan dapat menginformasikan ke publik kinerja dan efektivitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi pada laporan keuangan tahun sebelumnya, tentu hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan efektivitas perusahaan baik, sehingga hal ini mempengaruhi perusahaan untuk tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [5].

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.4.2. Pengaruh Likuiditas terhadap Ketepatan Waktu

Likuiditas mengukur sampai seberapa jauh tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek yang akan segera jatuh tempo. Likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kondisi perusahaan yang kuat. Dengan begitu perusahaan harus secara terus menerus memantau hubungan antara besarnya kewajiban lancar dengan aset lancar. Suatu perusahaan dapat dikatakan baik jika perusahaan tersebut dalam keadaan likuid, artinya perusahaan mampu untuk melunasi seluruh kewajiban yang ada. Semakin likuid kondisi perusahaan maka semakin besar kepercayaan para investor dalam menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut, sehingga perusahaan semakin tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya karena telah mendapat kepercayaan yang besar. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [5].

H2: Likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.4.3. Pengaruh *Leverage* terhadap Ketepatan Waktu

Tingginya *Debt to Equity Ratio* (DER) suatu perusahaan mencerminkan tingginya resiko keuangan suatu perusahaan. Sedangkan resiko keuangan yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melunasinya. Hal ini merupakan berita buruk yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan di mata publik. Ketika perusahaan mempunyai proporsi jumlah hutang yang lebih banyak (tinggi) daripada jumlah ekuitas maka pihak manajemen cenderung menunda penyampaian laporan keuangan yang memuat berita buruk. Perusahaan dengan kondisi *debt to equity ratio* yang tinggi akan terlambat dalam penyampaian pelaporan keuangannya, karena waktu yang digunakan untuk menekan *debt to equity ratio* serendah-rendahnya dan pihak manajemen harus mengumpulkan bukti-bukti. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [5].

H3: *Leverage* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.4.4. Pengaruh Kompleksitas Operasi Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu

Kompleksitas operasi perusahaan berkaitan dengan penggabungan usaha yang dilakukan oleh dua perusahaan. Kompleksitas perusahaan dapat dilihat dari jumlah dan jenis transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut. Semakin besar skala suatu usaha maka semakin banyak jenis dan kompleksitas proses bisnis yang terdapat didalamnya. Kompleksitas operasi perusahaan bisa diukur dengan menghitung jumlah anak perusahaannya. Semakin banyak jumlah anak perusahaan maka semakin panjang pula waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menyelesaikan proses audit. Hal ini akan berdampak pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan suatu perusahaan.

H4: Kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.4.5. Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Ketepatan Waktu

Kepemilikan publik mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, dimana semakin tinggi atau besar kepemilikan saham publik dalam suatu perusahaan maka perusahaan akan menyampaikan informasi perusahaannya secara tepat waktu karena banyak dari masyarakat membutuhkan informasi tersebut. Jika semakin besar saham yang dimiliki publik maka semakin banyak pengawasan yang dilakukan dan perusahaan harus dapat mengungkapkan seluruh informasi yang diperlukan pemegang saham. Dengan adanya pengawasan ini para investor dapat memperoleh informasi dengan cepat dan tepat tentang perusahaan tempat ia berinvestasi karena pihak manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan perusahaan dapat secara tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [5].

H5: Kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.4.6. Pengaruh Reputasi KAP terhadap Ketepatan Waktu

Reputasi KAP mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan karena KAP memberikan jaminan secara independen kepada investor bahwa laporan keuangan yang disajikan perusahaan telah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Guna menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi, perusahaan cenderung menggunakan auditor yang memiliki reputasi baik. KAP dengan reputasi yang baik dinilai akan lebih efisien dalam melakukan proses audit dan akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kewajaran dari laporan keuangan perusahaan. KAP yang berafiliasi dengan KAP big four biasanya lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan dibandingkan dengan KAP non big four karena KAP big four mempunyai fasilitas yang memadai dan staf yang profesional sehingga pekerjaan lebih efisien. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa reputasi KAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [5].

H6: Reputasi KAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.4.7. Pengaruh Pergantian Auditor terhadap Ketepatan Waktu

Pergantian auditor yang lama ke auditor yang baru bisa saja terjadi karena auditor yang lama mengundurkan diri ataupun habisnya masa periode atau masa kerja dari sebuah perusahaan. Pergantian auditor lama ke auditor baru membutuhkan proses. Apabila terjadi pergantian auditor yang lama ke auditor yang baru dalam sebuah perusahaan membutuhkan komunikasi yang baik antara auditor yang lama dengan auditor yang baru karena kinerja atau laporan keuangan perusahaan yang lalu lebih diketahui oleh auditor lama. Pergantian auditor yang lama dengan auditor baru mengakibatkan proses pengauditan suatu laporan keuangan menjadi lebih lambat dari sebelumnya, sehingga cenderung tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [5].

H7: Pergantian auditor berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.4.8. Pengaruh Opini Audit terhadap Ketepatan Waktu

Opini audit dibutuhkan untuk setiap laporan keuangan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Opini audit harus diberikan pada laporan keuangan guna memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Perusahaan yang mendapatkan pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dari auditor cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Hal ini disebabkan pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) merupakan berita baik perusahaan dari auditor sehingga penyampaian laporan keuangannya akan dipercepat. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [14].

H8: Opini Audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.